

Timbangan Buku

Sejarah Politik Militer di Indonesia

Sebuah studi yang penting, semula merupakan disertasi mencapai derajat doktor dalam ilmu politik yang diajukan kepada Ohio University di Amerika Serikat, kini telah terbit sebagai sebuah buku. Buku itu ialah karya ilmiah pertama oleh seorang Indonesia, mengenai masa 1945 hingga masa Orde Baru.

Genesis of Power. General Soedirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49 oleh Salim Said. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies 1991. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1992, XXII, 185 hal.

SALIM Said telah melakukan rekonstruksi sejarah yang merupakan pentas asal-usul kekuasaan militer Indonesia, dan untuk itu tokoh dalam sejarah revolusi, Jenderal Soedirman, yang berpengaruh dalam kehidupan politik militer antara tahun 1945-1949, dijadikan fokus pembahasan. Akan tetapi ia tidak berhenti pada 1949 atau pada hari wafatnya Jenderal Soedirman pada 29 Januari 1950. Setelah menempatkan permasalahan dalam empat segi yang muncul selama revolusi, ia juga mengupas hubungan militer-sipil pada masa pasca perjuangan kemerdekaan, tentang ideologi yang berubah pada militer Indonesia, perbedaan interpretasi, dan kemungkinan perubahan masa datang pada zaman Orde Baru. Empat segi pengalaman kaum militer Indo-

nesia pada masa revolusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang lahir sebagai kreasi mandiri (*self-creation*), sikap laku politik Jenderal Soedirman, konteks kelemahan lembaga-lembaga sipil yang melingkari pelaksanaan kepemimpinan Soedirman, dan tumbuhnya pola pemerintahan militer dalam masa perang kemerdekaan menjadi pembahasan dalam rangka rekonstruksi sejarah. Dengan latar belakang pengaruh mobilisasi yang dilakukan Jepang terhadap para pemuda, yang menambah kesadaran bersenjata untuk berjuang bagi kemerdekaan. Partisipasi mereka setelah Republik Indonesia berdiri mula-mula terpecah dalam kelompok bebas sesuai dengan cita-cita politik, keragaman agama, solidaritas etnik, dan karena persahabatan satu sama lain pada masanya dapat menghadapi musuh yang satu, yaitu kembalinya penjajahan Belanda. Akan tetapi di dalam negeri perbedaan-perbedaan itu juga digunakan oleh golongan politik untuk mendapat dukungan bersenjata atau sebaliknya golongan bersenjata berusaha mendapat dukungan politik. Dilihat dari sudut ini kele-

mahan yang ada pada pemerintahan sipil juga terdapat pada organisasi kemiliteran. Kedua sektor yang memimpin revolusi akhirnya punya pengalaman bersama yaitu bagaimana caranya menangkal kekuatan dan kekuasaan Belanda di bidang militer dan politik. Apabila dalam praktek pemerintahan sipil memang dalam posisi lemah, tetapi di tingkat pusat potensi intelektual dan kemampuan kepemimpinan ada pada politisi kawakan dari 1920-an. Elite militer yang memimpin TNI terdiri dari lapisan yang lebih muda dari politisi kawakan, lebih dinamis dan segar dalam melihat persoalan Indonesia Merdeka.

Cakrawala pandangan militer masih terbatas pada perjuangan mempertahankan wilayah RI, sedangkan politisi kawakan telah memperhitungkan perubahan dunia dan kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh menghadapi kemungkinan timbulnya Perang Dunia III. Cakrawala pandangan politik mereka sudah barang tentu ialah perjuangan diplomatik, yang menyertakan juga tokoh-tokoh militer sebagai penasihat militer dalam perutusan RI. Keberadaan dua kubu kepemimpinan itu -- militer dan politik -- menjadi ciri masa revolusi, yang sejak semula memang bertujuan membina negara yang teratur, tetapi yang mesti harus melalui kekacauan konsep maupun sikap laku politik para pendukung RI. Kenyataan ini pada akhir-akhir ini seolah-olah ingin dihindari dalam penilaian yang hanya mengambil satu jalur interpretasi, tokoh-tokoh kontroversial tidak bisa diungkap kembali, yang pernah "bersalah" tidak boleh dinilai kembali, perbedaan pendapat dianggap sebagai sesuatu yang merugikan dan bukan sebagai rahmat yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan hidup berbangsa. Pendeknya revolusi Indonesia sekarang ini lebih dikenal se-

bagai mitos daripada sebagai kenyataan sosial yang antara lain harus dipahami sekarang melalui suatu rekonstruksi sejarah.

Studi Salim Said, yang menurut dugaan saya tidak mengalami masa revolusi, dengan demikian lebih lugas dalam pendekatannya dan untuk itu diperlukan sumber-sumber tertulis yang begitu banyak. Studi-studi tentang masa revolusi Indonesia juga dipergunakan di samping wawancara yang dilakukannya dengan tokoh-tokoh masa revolusi. Sampai di sini khususnya tiga bab pertama dalam bukunya tentang revolusi, terbentuknya TNI, tema TNI, Pemerintah, dan Oposisi, sebenarnya telah banyak diketahui, walaupun ada dua sumber yang didapat oleh umum di Indonesia. Sebagian besar generasi sekarang lebih banyak mendengar itu dalam pidato-pidato peringatan dan tulisan-tulisan yang memperingati peristiwa penting di majalah dan surat kabar, sebagian kecil mendapatkan informasi dari karangan-karangan hasil studi ilmiah. Persepsi dan pengetahuan tentang masa revolusi dengan demikian menjadi sepotong-sepotong dan terpengaruh oleh pandangan monolitik mereka yang mengalami masa revolusi.

Demikianlah ketika Salim Said mencoba untuk merekonstruksi sikap laku politik Jenderal Sudirman, ia melangkah masuk dalam persoalan yang sulit bagi seorang peneliti, karena tokoh yang bersangkutan ternyata tidak dapat diikuti melalui sumber-sumber primer yang dibuat sendiri oleh sang tokoh. Untuk itu ia menggunakan *Kumpulan Amanat Panglima Besar Soedirman* (Dep. Hankam, Pusjarah ABRI 1970) dan dua surat Panglima Besar kepada Soekarno dan Nasution. Selebihnya ia memakai bahan analisisnya melalui banyak bahan "seperti diingat" -- *as remembered* -- oleh para saksi sejarah sekitar Panglima Besar. Melejitnya

tokoh ini dalam sejarah revolusi dan aktivitas dalam kesempatan yang begitu singkat, membuat analisis pribadi tokoh ini terasa kurang lengkap dan mendalam sifatnya. Akan tetapi seperti yang telah disebut di muka, ketidakterikatan dengan situasi revolusi, ia tampak lebih bebas dalam melakukan analisisnya, walaupun dilihat dari sudut rekonstruksi sejarah suasana sensasi sejarah -- *historical sensation* -- (*Resink*) tidak cukup terungkap. Hubungan Panglima Besar dengan Tan Malaka dalam arti sikap politik yang sejalan sehubungan dengan diplomasi yang dijalankan Sutan Sjahrir mendapat tempat yang cukup banyak, sebaliknya tentu sulit untuk direkonstruksi data yang berhubungan dengan lobi politik yang begitu banyak dilakukan Soedirman. Diulas juga di bagian lain buku ini bagaimana sikap Panglima Besar terhadap Pemberontakan Madiun. Demikianlah kita dibawa masuk dalam gambaran watak dan kepribadian Soedirman sebagai Panglima Besar yang terpilih, dan bukan atas pengangkatan pemerintah pusat. Bab lima yang menyusul merekonstruksi jalannya perang dari desa-desa, hutan-hutan, dan gunung-gunung.

Dalam periode itu pemerintahan militer yang sebenarnya dijalankan di Jawa, karena politisi kawakan telah ditawan Belanda sejak 19 Desember 1948. Apabila di Jawa kepala pemerintahan militer adalah seorang TNI, justru di Sumatera adalah seorang sipil. Posisi diplomatik mereka yang ditawan pun ternyata semakin kuat atas dukungan Amerika Serikat melalui PBB. Ketika Konferensi Meja Bundar diadakan di Belanda, maka mulailah dialog antara pimpinan sipil

dan militer, sikap Panglima Besar yang keras terhadap perundingan KMB cukup kita ketahui. Pada saat itu Panglima Besar yang dalam keadaan sakit keras telah mengarungi desa, hutan, gunung, dan kemudian kembali ke kota telah menjadi lambang perjuangan yang semakin jelas, bahkan perjalanan panjangnya selama gerilya diselimuni kabut kesucian dan mukjizat akan kebenaran yang ditempuh perjuangan bersenjata.

Seperti telah disebut di awal tinjauan ini, Salim Said tidak berhenti pada tahun 1949/1950. Ia menganalisis peranan militer Indonesia yang semakin dominan dalam kehidupan politik Indonesia sekarang. Keabsahan historis mengenai peran itu memang tak menjadi persoalan, akan tetapi partisipasi ABRI dalam politik sekarang ini tentu memerlukan perumusan kembali dari peran mereka, yang tidak semata-mata mengacu kepada contoh yang diberikan Jenderal Soedirman. Kekuatan sosial yang tumbuh sejak 1950 melalui 1965 memang lain daripada masa revolusi.

Dilihat dari sudut studi sejarah, kelemahan pokok ialah tidak banyaknya dokumen primer Indonesia, seperti sebaliknya yang dimiliki pihak Belanda. Bagaimanapun juga studi Salim Said perlu mendapat perhatian lebih luas dalam terjemahan Bahasa Indonesia. Gaya ceritera menjamin bahwa bukunya itu akan cepat menumbuhkan persepsi dan pengetahuan tentang sejarah masa revolusi dan sesudahnya dengan lebih luas.

Abdurrachman Surjomihardjo